

Pembangunan Ekonomi dan Kepedulian Masa Depan

Oleh : Darwati Susilastuti

(Guru Besar Fakultas Pertanian dan Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur)

ABSTRACT

Indonesian economics growth was height in three decades lately, but nature resources and environment were decreasing. When Indonesia was hit by severe monetary crisis, the situation got worst in 1997. This situation was followed not only by massive economics meltdown, but also serious socio-political and ecological crisis.

Indonesia has revised and enacted several laws and regulation in attempt to provide policy basis for sustainable development, among others it enacted Law No. 23 of 1997 on Environmental Management. The National Agenda 21 Provided a reference to mainstream sustainable development principles into the country's national development planning. The PROPENAS is national development programs that contains the three pillars of sustainable development i.e. economic, socio-culture and environmental management although their integration needs to be strengthened. Their implementation was not integrated yet and development in Indonesia was unsustainable.

Shifting from a situation of environmental, social, economics and political crisis towards sustainability will be very difficult and take time. But if action is delayed, the problems will become greater than before and sustainable development will be beyond the grasp of present or future generation.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam (SDA) adalah salah satu modal dasar perekonomian Indonesia. Dalam pengelolaan kekayaan alam, para pendiri bangsa melalui UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa alam beserta segala isinya digunakan uuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, tugas dari generasi penerus adalah menterjemahkan amanat tersebut agar semua yang telah diperjuangkan dan yang dicita-citakan seluruh masyarakat Indonesia dapat tercapai. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama untuk menyusun strategi pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup yang optimal dan lestari bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia.

Pembangunan ekonomi merupakan tujuan pokok pembangunan Indonesia yang bertumpu pada tiga unsur penting yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas nasional. Tahun 1970-an dan awal 1980-an, pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada devisa migas. Namun demikian, ketika harga migas menurun pada tahun 1980-an pemerintah mulai menitikberatkan perhatiannya pada program reformasi struktural yang ditujukan untuk memelihara pertumbuhan ekonomi serta mendorong ekonomi sektor swasta dan strategi pertumbuhan ekspor. Untuk ini pemerintah menitik beratkan pada tiga tujuan penting (Addinul Yakin, 2004 : 229) :

1. Menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, termasuk

mempertahankan stabilitas ekonomi makro, pelaksanaan reformasi perdagangan lebih lanjut dan deregulasi industri, memperkuat sektor finansial, dan meningkatkan kerangka institusi dan hukum yang menunjang perkembangan sektor swasta.

2. Investasi di bidang infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia, untuk meyakinkan bahwa perkembangan sektor swasta tidak dihambat oleh kurangnya fasilitas komunikasi, transportasi, energi listrik dan sebagainya. Di samping itu sumber daya manusia ditingkatkan keahlian dan kemampuannya untuk mendukung pengembangan teknologi tinggi dan menjadi tenaga kerja yang meningkatkan proses nilai tambah.
3. Melakukan intervensi yang terarah bagi usaha mengurangi kemiskinan dan melindungi lingkungan, sekiranya kekuatan pasar tidak mampu menciptakan pemerataan dan keadilan dalam proses pembangunan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif pembangunan terhadap lingkungan.

Menurut Tulus (2001), Faisal Basri (2002), Addinul Yakin (2004), Bungaran Saragih (2011), dan BPS (2012), sepanjang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, banyak yang bisa dicatat terutama dari perkembangan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai dengan sekarang. Dilihat dari aspek pertumbuhan PDB per tahun pada periode 1965-1988, Indonesia menunjukkan keberhasilan yang

luar biasa. Pada tahun 1988, total PDB Indonesia telah mencapai sebesar 82.70 milyar dollar Amerika dan menempati urutan 28 dunia. Laporan Bank Dunia 1996 menunjukkan bahwa PDB Indonesia tahun 1995 telah mencapai 198,1 milyar dollar Amerika. Ini berarti bahwa terjadi peningkatan lebih dari dua kali lipat. Dilihat dari peningkatan pendapatan perkapita (PDB), Indonesia menunjukkan angka yang menakjubkan. Pada tahun 1970, pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 90 dollar Amerika kemudian meningkat menjadi US\$ 473 pada tahun 1988.

Namun karena jumlah penduduk yang besar, berdasarkan pendapatan per kapita masih relatif kecil dan menempatkan Indonesia pada urutan 106 dunia pada tahun 1988. Laporan Bank Dunia tahun 1996 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita (PDB) 1995 telah mencapai 108,3 dollar Amerika. Ini berarti bahwa dalam 7 tahun terakhir pendapatan per kapita itu meningkat lebih dari dua kali lipat.

Pertumbuhan sektor industri lebih mengesankan. Rata-rata pertumbuhan industri per tahun pada periode 1965-1988 mencapai rata-rata 8,5 %, dan rata-rata pertumbuhan output per kapita juga meningkat sampai 6,2 persen pada periode yang sama. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi lima besar Asia dalam hal pertumbuhan dan efisiensi industri. Hal ini antara lain karena kebijaksanaan ekonomi

pemerintah yang menitik beratkan sektor industri (non migas) agar tidak tergantung pada sektor migas untuk keperluan ekspor. Perkembangan industri yang pesat juga ditunjukkan oleh konsumsi energi total Negara yang relatif tinggi. Pada tahun 1987/1988, konsumsi total energi mencapai 46.629.000 ton yang merupakan konsumsi 31 besar dunia dan 5 besar Asia. Di bidang pertanian telah terjadi perkembangan yang positif. Persentase total ekspor pangan jauh melebihi impornya. Disamping itu pertumbuhan pangan per kapita mencapai 2,7 % per tahun selama periode 1977-1988, dan menempati urutan ke lima Asia. Keberhasilan sektor industri dan kebijaksanaan ekspor, maka Indonesia termasuk Negara yang neraca perdagangannya umumnya surplus. Selama periode 1984-1986, rata-rata surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 4.286 juta dollar Amerika. Angka ini pada periode yang sama menempati urutan 16 dunia dan lima besar Asia. Pada tahun 1987/1988 surplus neraca perdangan itu bahkan meningkat menjadi 5.726 juta dollar Amerika. Perkembangan ekonomi Indonesia sebagai Naga baru di dunia terutama di Asia, sudah menjadi perhatian dunia bahkan bukan hanya faktor ekonomi tapi juga politik.

Setelah krisis tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008-2011 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 6,0 persen (2008), 4,6 persen (2009), 6,2 persen (2010), dan 6,5 persen (2011)

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada semester I tahun 2012 bila dibandingkan dengan semester II tahun 2011 tumbuh sebesar 2,2 persen dan bila dibandingkan dengan semester I tahun 2012 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,3 persen. Tiga sektor utama yaitu Pertanian; Industri Pengolahan; dan Perdagangan, Hotel, dan Restoran mempunyai peran lebih dari separuh dari total perekonomian yaitu sebesar 56,3 persen (2008), 55,0 persen (2009), 53,8 persen (2010) dan 52,8 persen (2011) serta 52,3 persen pada semester I tahun 2012. Pada tahun 2011, Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 24,3 persen, Sektor Pertanian 14,7 persen, dan Sektor perdagangan, hotel dan Restoran 13,8 persen (BPS, 2012: 13-15).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, dari sisi pengeluaran, pada tahun 2008 hingga semester I tahun 2012 selalu menunjukkan pertumbuhan positif, kecuali ekspor dan impor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009. Pada tahun 2011, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,7 persen, konsumsi pemerintah 3,2 persen, pembentukan modal tetap bruto 8,8 persen, ekspor barang dan jasa 13,6 persen, dan impor barang dan jasa sebesar 13,3 persen. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2012 terhadap semester I tahun 2011 (c-to-c) meningkat sebesar 6,3 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada komponen

pembentukan modal, impor barang dan jasa serta pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing sebesar 11,2 persen, 9,5 persen, dan 6,5 persen. Sumber pertumbuhan terbesar semester I tahun 2012 dibandingkan dengan semester I-2011 berasal dari komponen impor barang dan jasa sebesar 3,6 persen (BPS, 2012: 16-18).

Perkembangan sektor industri yang pesat telah mendorong urbanisasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan. Pertumbuhan industri baik jumlah maupun kapasitasnya telah mengancam lingkungan melalui polusi udara dan air yang ditimbulkannya.

Di perkotaan sendiri, kepadatan penduduk, kondisi perumahan dan sanitasi juga menjadi masalah tersendiri. Pertumbuhan industri dan kota telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Di sektor primer (pertanian), penerapan teknologi intensif-modern telah meningkatkan produktifitas lahan yang tinggi, pendapatan usahatani dan kesempatan kerja, tapi pada dekade terakhir ini telah mulai dirasakan adanya dampak negatifnya terhadap lingkungan. Masalah seperti kehilangan keragaman hayati (*biological diversity*), erosi atau degradasi lahan, polusi telah mendapatkan perhatian yang serius. Kegiatan primer berupa eksploitasi alam lainnya seperti *deforestasi* menimbulkan masalah yang tersendiri. Konversi lahan pertanian menjadi

non pertanian mencapai rata-rata 187.719,710 ha/th, bahkan di Pulau Jawa pada tahun 2010 susut menjadi 3,5 juta ha dari 4,1 juta ha pada tahun 2007, atau telah terkonversi sebesar lebih kurang 600 ribu ha (Nana Apriyana, 2011: 4-5).

Dampak pembangunan ekonomi ternyata mempunyai sisi ganda yaitu sisi cerah dan sisi suram. Dampak yang cerah ialah dampak positif terhadap masyarakat dan sisi suram ialah dampak negatif untuk masyarakat. Karena dua faktor ini saling terkait dan berinteraksi, maka perhatian terhadap lingkungan (fisik maupun sosial) juga akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi jangka waktu panjang. Jika faktor sosial dan lingkungan ini tidak diperhatikan, maka kebijakan ekonomi akan hanya menguntungkan dalam jangka waktu yang pendek dan mengakibatkan degradasi lingkungan dari waktu ke waktu yang akhirnya bisa jadi kapasitas sumberdaya alam tidak lagi bisa menopang kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Maka diperlukan adanya proses integrasi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan dalam kebijaksanaan pembangunan lebih lanjut, yang sekarang dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan (*sustainable development*)

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, akan dibahas secara khusus tentang

peluang dan tantangan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, masalah-masalah lingkungan yang menonjol di Indonesia akan dibahas secara ringkas, serta langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah untuk mencapainya. Selain itu dikemukakan beberapa faktor—faktor yang harus diperhatikan serta hambatan-hambatan yang ada agar pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan mendapat dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat.

. Pembangunan ekonomi tidak akan pernah lepas dengan pembangunan lingkungan dan pembangunan saat sekarang atau pembangunan generasi sekarang adalah warisan pembangunan generasi sebelumnya dan akan diwariskan pada generasi yang akan datang sebagai kepedulian masa datang.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang akan dicoba dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana hubungan antara pembangunan ekonomi dengan tekanan pada lingkungan
2. Sejauhmana kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia
3. Sejauhmana perhatian pemerintah terhadap pembangunan lingkungan
4. Sejauhmana kebijakan pemerintah terutama di era reformasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

5. Faktor-faktor apa saja sebagai penentu keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

BAHAN DAN METODE

Pembangunan dan Lingkungan

Pembangunan sebagai istilah mempunyai arti sangat beragam dan berubah dari waktu ke waktu, yaitu tergantung nilai-nilai dasar yang dianut, asumsi-asumsi atau premis-premis yang digunakan dalam telaahan, tingkat akumulasi pengetahuan masyarakat dalam kaitannya dengan alam dan kehidupan yang terwujud serta perubahan persepsi masyarakat tentang sesuatu yang dipandang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk generasi kini maupun generasi mendatang (Joyo Winoto, 2000). Dari berbagai teori pembangunan terdapat empat (4) perhatian proksis pembangunan yaitu : (1) perubahan terencana (*planned change*), (2) transformasi struktural (*structural transformation*), (3) otonomi (*autonomy*) dan (4) keberlanjutan (*sustainability*).

Setiap bangsa membutuhkan pembangunan, ini merupakan suatu tujuan yang wajar. Kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur penting dari setiap pembangunan, namun bukan merupakan unsur satu-satunya (Todaro, 1995). Pembangunan merupakan proses multi dimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial ekonomi

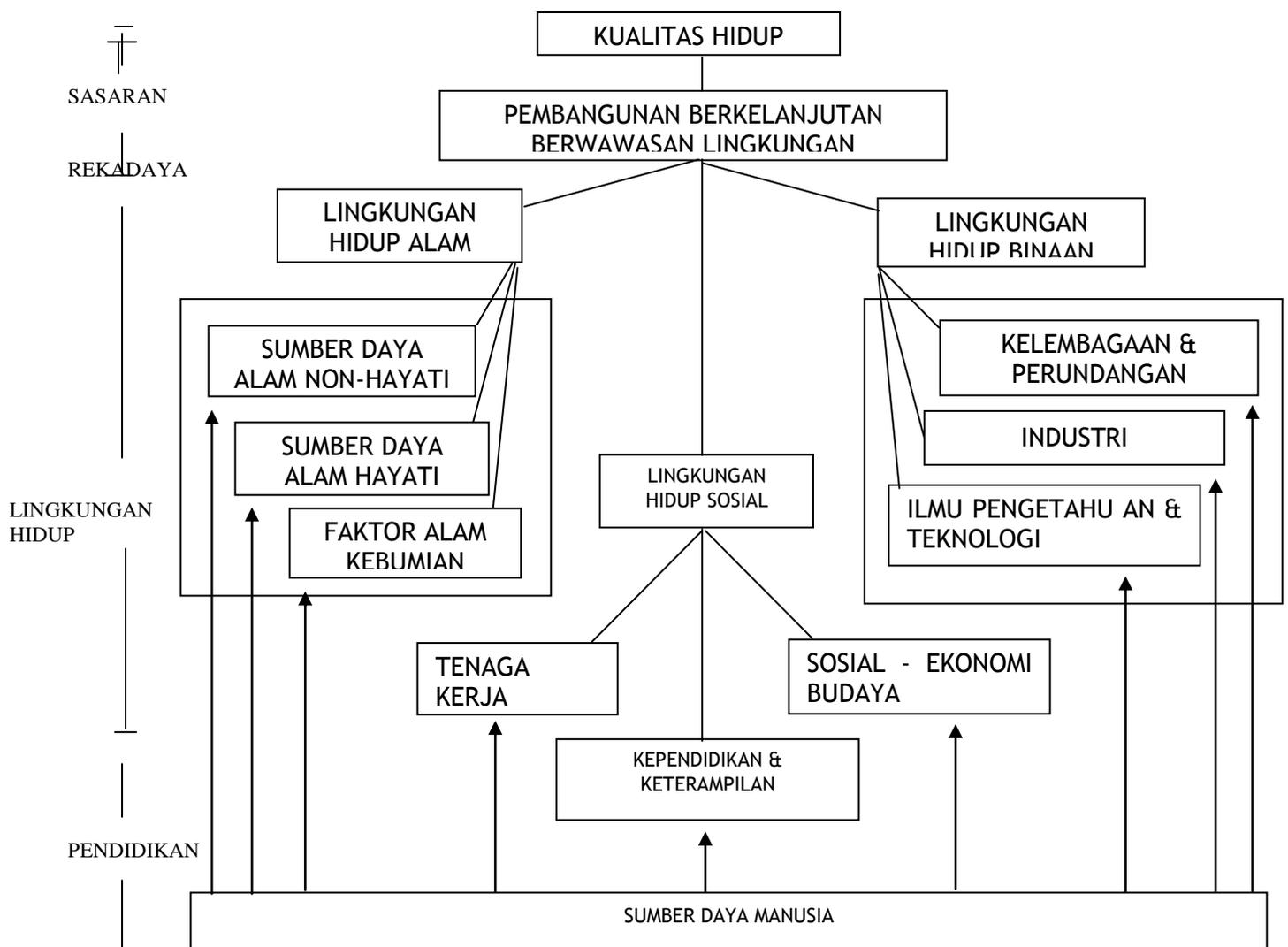
yang ada. Menurut Soerjani (2002), berbagai 1. untuk meningkatkan ketersediaan dan kegiatan pembangunan akan mengalami dukungan maupun keterbatasan sumberdaya manusia, sumber daya alam (fisik maupun hayati). . Model pembangunan, sasaran pembangunan dan pendukung-pendukungnya adalah seperti yang terlihat pada Gambar 1.

memperluas pengadaan barang-barang kebutuhan pokok

2. untuk meningkatkan taraf kehidupan yang meliputi : pendapatan, lapangan kerja, sarana pendidikan, pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan (dan sumber daya alam). .

Menurut Todaro (1995), terdapat tiga

(3) tujuan pembangunan, yaitu :



Gambar 1. Model Pembangunan Berkelanjutan dengan Sasaran dan Berbagai Komponen Pendukung (Soerjani, 2002)

Pembangunan pada dasarnya adalah perbaikan kesejahteraan masyarakat terus menerus, sepanjang waktu, ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif (Faisal Basri, 2002; Bungaran Saragih, 2011). Pertumbuhan ini hanya akan berkelanjutan jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Salah satu yang terpenting adalah sumber daya alam selain sumber daya manusia. Oleh karena itu sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pembangunan yang mengacu pada kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sering disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) atau pembangunan berwawasan lingkungan.

Menurut Undang-undang No 23 tahun 1997 jo No 32 tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya

sadar terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut Agenda 21 (2000), pembangunan adalah upaya untuk membuat kondisi manusia lebih baik, mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan tekanan manusia pada manusia dan tekanan manusia pada ekosistem. Sementara itu konservasi adalah menjaga atau mengembalikan kondisi ekosistem serta mengendalikan tekanan ekosistem pada ekosistem. Pembangunan berkelanjutan adalah perpaduan antara pembangunan dan konservasi berfokus pada manusia dan komunitas dengan menjamin ketersediaan sumberdaya (alam, buatan, manusia dan sosial) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan memerlukan upaya dan tindakan yang berkelanjutan menuju kondisi yang selalu menjadi lebih baik. Komponen pembangunan berkelanjutan adalah **sosial, ekonomi** dan **lingkungan**. Paradigma pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah mencapai produksi yang optimum, mensejahterakan pelaku dan melestarikan lingkungan. Pelaku ekonomi yang perlu dilindungi dan disejahterakan antara lain adalah petani, nelayan, pedagang kecil dan lainnya.

Masalah Lingkungan di Indonesia.

Sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunan sektor primer (pertanian dan pertambangan) dan sektor sekunder (industri) tidak hanya membawa implikasi terhadap lingkungan hidup baik positif maupun negatif. Sebagai negara yang baru tumbuh, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, bisa membawa implikasi yang serius terhadap lingkungan, karena perangkat kebijaksanaan serta infrastruktur yang mampu menekan efek negatif tersebut belum memadai. Walaupun sebagian besar efek negatif lingkungan di Indonesia banyak disebabkan aktifitas ekonomi di sektor primer seperti pertanian dan pertambangan (deforestasi, erosi, dan sebagainya), perkembangan sektor industri yang pesat telah menjadi ancaman serius. Hal ini terlihat dengan meningkatnya kadar polusi udara dan air, serta kurangnya sanitasi, yang dipacu lagi oleh jumlah penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu

Jika diklasifikasi, ada empat masalah lingkungan yang sangat serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu (Faisal Basri, 2002; Addinul Yakin, 2004; Nana Apriyana, 2011) :

1. Deforestasi hutan Indonesia menduduki tempat kedua dalam luas setelah Brazil, dan mewakili 10 persen dari hutan tropis dunia yang masih tersisa. Hampir 75 persen dari luas lahan Indonesia

digolongkan sebagai areal hutan (sekitar 144 juta hektar), dan 100-110 juta hektar diperkirakan sebagai hutan lindung (*closed canopy*) yang lebih kurang 60 juta di peruntukkan bagi hutan produksi. Proses deforestasi yang berlangsung dengan tingkat tinggi, akan mengancam penyediaan bahan kayu dasar dan produk hutan sekunder dan mengurangi pelayanan lingkungan seperti proteksi sumber mata air dan preservasi habitat alam yang penting. Degradasi hutan yang diakibatkan oleh proses deforestasi di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kebijakan pemerintah melalui transmigrasi dan pemberian hak perusahaan hutan (HPH) tapi juga karena aktifitas masyarakat baik individu maupun kelompok. Kebijakan pemerintah yang mengakibatkan proses deforestasi adalah ijin HPH karena alasan ekonomi. Kemudian melalui pengembangan industri-industri kertas, pulp, dan pengolahan kayu yang ada di Indonesia yang dikenal dengan tebang pilih (*the selective logging*) sekitar 3000 mil kubik dari hutan "*perawan*" pertahun dan perubahan (*conversion*) sebanyak 16000 mil kubik untuk pertanian dan perkebunan pada tahun 1994. Kebijakan konsesi atau kemudahan penebangan hutan (*logging*

concession) telah ikut pula memperparah keadaan deforestasi.

Selain itu, program transmigrasi, baik yang terorganisir maupun yang spontan, membuka lahan yang luas yang awalnya merupakan hutan alam, juga membantu terjadinya proses deforestasi yang menonjol. Selain aktifitas masyarakat menyebabkan proses deforestasi misalnya dengan masih adanya perladangan berpindah di beberapa daerah, dan aktifitas yang tidak terpuji lainnya seperti pencurian kayu atau penebangan secara liar dan sebagainya. Jika kebijaksanaan dan perilaku masyarakat ini berlanjut terus menerus, maka perlu diatur bagaimana penggunaan sumber daya hutan agar sustainable dengan kata lain diupayakan bagaimana mengelola hutan agar tidak sampai menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Tingkat deforestasi yang tinggi menurunkan daya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi ekologisnya sehingga bisa menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang serius seperti erosi dan penurunan kualitas lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati (*biological diversity*), serta bahkan kenaikan suhu bumi (*global warming*). Word Resource Institute (1993) menempatkan masalah degradasi hutan tropis akibat deforestasi (*rainforest*

degradation) merupakan masalah lingkungan utama di Indonesia.

Proses deforestasi juga terjadi pada hutan bakau (*mangrove forest*). Pengembangan tambak/kolam ikan dan produksi garam, serta kegiatan lain seperti perluasan perumahan penduduk, pembuatan atau pelebaran jalan, dan aktivitas penduduk sekitar untuk kayu bakar dan arang adalah beberapa factor yang memberikan kontribusi yang berarti terhadap proses deforestasi tersebut. Deforestasi hutan bakau ini telah membawa dampak lingkungan tersendiri. Fungsi dan peranannya dalam menjaga keseimbangan ekologi daerah pantai menjadi terganggu. Fungsinya sebagai proteksi pantai dari erosi dan luapan sediman dari daratan menjadi berkurang. Selain itu, hutan bakau sebagai habitat berbagai macam tanaman dan hewan laut menjadi terancam, sehingga masalah kehilangan keragaman hayati (*loss of biological diversity*) di sekitar daerah pantai ini diduga sangat besar. Maka perhatian yang serius dalam penanganan hutan bakau perlu diupayakan agar efek lebih lanjut yang lebih parah bisa dihindari.

Pemerintah Indonesia telah mengizinkan eksploitasi secara komersial dengan memberikan lebih dari 500 HPH. Dalam pengelolaannya, para pemegang HPH dianjurkan untuk melaksanakan

pendekatan “tebang pilih” yang mengkombinasikan tebang dan tanam secara cermat. Dengan system ini diharapkan bahwa pengelolaan hutang dapat dilakukan secara berkelanjutan (berwawasan lingkungan). Sayangnya, dalam pelaksanaannya, pengelola HPH ini banyak yang tidak memenuhi konsep yang sebenarnya. Tingkat deforestasi atau berkurangnya wilayah hutan di Indonesia belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan antaran 300.000 sampai 1,3 juta ha per tahun (The World Bank, 1990).

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya perlindungan ekosistem hutan tropis Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memelihara ekosistem dunia dan mengandung banyak keragaman hayati dunia yang masih tersisa. Untuk kepentingan tersebut, Indonesia telah menyisihkan 19 juta ha atau 10 persen dari luas wilayah Indonesia sebagai taman nasional dan cagar alam, dan 30 juta ha sebagai hutan lindung tetap untuk melindungi hulu sungai yang utama. Direncanakan pula disediakan sekitar 30 juta ha untuk wilayah konservasi laut. Jika ini telah dikelola dengan tepat dengan memperhatikan distribusi rencana tersebut di seluruh Indonesia, maka usaha ini akan sangat membantu untuk menjaga ekosistem alam dan keragaman

hayati. Untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan, pemerintah Indonesia mempersiapkan suatu rencana aksi hutan tropis (*Tropical Forest Action Plan*) agar pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

2. Degradasi lahan

Degradasi lahan (*land degradation*) berupa erosi merupakan masalah lingkungan serius di Indonesia. Masalah terjadi bukan hanya karena proses deforestasi tetapi juga sebagai dampak dari pertanian yang intensif-modren. Pada daerah-daerah luar Jawa, lahan marjinal yang terbaik yang tertutup hutan banyak yang sudah dan sedang diubah untuk pertanian. Di pulau Jawa, lahan pertanian yan subur telah berubah fungsi menjadi kepentingan perkotaan dan industri. Besarnya konversi telah mencapai 187.719,710 ha/th. Pada daerah-daerah dataran tinggi dan sekitar aliran sungai yang mengalami erosi tanah adalah tinggi. Erosi yang sering diakibatkan oleh penebangan hutan mengancam pengangkutan air, system irigasi dan kehidupan ikan-ikan di daerah hilir.

3. Kekurangan air atau Kelebihan Air (Banjir)

Kekurangan air (*water shortages*) merupakan salah satu masalah lingkungan utama di Indonesia. Karena deforestasi pada daerah dataran tinggi

(*upland*) telah mengakibatkan meningkatnya permintaan air dan meningkatkan polusi air permukaan akibat erosi. Pada musim kemarau, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa terjadi kekurangan air permukaan. Sementara itu sumber daya air tanah (*groundwater*) sekitar kota-kota sedang dikuras berlebihan (*overdrawn*). Kekurangan air ini juga diduga sebagai efek samping dari proses deforestasi dan erosi. Proses deforestasi misalnya dapat mengakibatkan berkurangnya sumber-sumber mata air bagi keperluan domestik maupun komersial, utamanya pada musim kemarau. Sementara itu pada musim hujan, terjadi erosi air permukaan, sehingga mengganggu keperluan domestik atau rumah tangga pedesaan yang masih sangat tergantung pada air permukaan ini. Selanjutnya, deforestasi pada musim penghujan menyebabkan air bah dan banjir.

4. Polusi udara dan air

Proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat sepanjang pantai utara Pulau Jawa telah mengakibatkan tingkat polusi air yang sangat tinggi dan selanjutnya mengancam pertumbuhan industri dan perkotaan. Limbah industri mencemari sungai-sungai di kota-kota pelabuhan, menimbulkan resiko kesehatan yang serius pada penduduk perkotaan yang tergantung dari sungai-sungai itu untuk

kebutuhan air dan ikan serta membunuh spesies dan merusak batu karang (*coral reefs*) di sepanjang lautan.

Polusi air merupakan masalah utama di Indonesia. Sumber polusi berasal dari industri dan kotoran serta sampah rumah tangga. Selain karena jumlah industri yang semakin banyak, sebagian besar industri belum memiliki alat penanganan limbah yang memadai. Selain karena jumlah penduduk yang besar, kontribusi polusi dari rumah tangga diperparah dengan terbatasnya sistem pembuangan kotoran sampah yang memadai seperti di negara-negara maju. Suplai air yang kurang juga dianggap sebagai faktor sehingga tidak cukup untuk menerapkan sistem pengaliran atau pembuangan kotoran dan limbah yang jumlahnya besar. Di beberapa daerah perkotaan polusi industri sama parahnya dengan polusi dari kotoran dan limbah. Studi yang dilakukan di daerah industri Tangerang pada tahun 1983 menjumpai polusi yang serius pada 10 lokasi yang diteliti. Penemuan yang paling mengkhawatirkan adalah tingginya konsentrasi logam berat dan bahan beracun lainnya pada sejumlah stasiun sepanjang sungai. Hasil penelitian USAID tahun 1987 terhadap ikan dan kerang (*shellfish*) yang diambil dari Pelabuhan Jakarta (Jakarta Bay), kandungan logam berat jauh melebihi

standar WHO yaitu 76% untuk cadmium (*cadmium*), 51 % untuk tembaga (*copper*), 44% untuk timah (*lead*), 38% untuk air raksa (*mercury*) dan 2% untuk khrom (*chromium*). Kandungan PCB dan DDT di dalam air pelabuhan berturut-turut mencapai 9 ppb dan 13 ppb, ini melampaui standar ambang polusi dari WHO yaitu 0,5 ppb. Hasil penelitian tentang polusi air di sungai-sungai terpilih di Jawa menunjukkan bahwa polutan yang paling menonjol adalah kotoran manusia yang ditunjukkan oleh besarnya kandungan fecal coliform yang melebihi 1000 adalah lebih dari tandar konvensional. Besarnya nilai BOD (*biochemical oxygen demand*) dan COD (*chemical oxygen demand*) juga melampaui standar konvensional di semua propinsi (World Bank, 1990) Hasil evaluasi terakhir program kali bersih (Prokasih) Sungai Musi menunjukkan beban pencemaran sungai ini mengalami kenaikan dengan parameter COD mencapai 37,08 %. Penyebab utama dari kondisi ini adalah akibat pembuangan rumah tangga serta industri di sekitarnya. Disamping itu, kontribusi limbah dari sekitar 108 sungai kecil yang bermuara ke Sungai Musi juga besar.

Indonesia beruntung bahwa penggunaan input kimia sektor pertanian bukan kontributor utama terhadap polusi air

(misalnya polusi nitrat). Hasil studi AMDAL terhadap rembesan dan aliran input kimia baik pestisida maupun pupuk dari kegiatan pertanian pada Proyek Irigasi Bali pada tahun 1983 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya relative kecil sejak pemerintah memperkenalkan pestisida yang bisa larut (*degradable pesticides*) pada awal 1970-an. Sementara rembesan pestisida di Pulau Jawa telah menyebabkan kerusakan ekologi selama bertahun-tahun sebagai akibat penggunaan pestisida keras dan yang tidak larut (*non degradable pesticides*) dari program subsidi pemerintah. Sementara itu berdasarkan laporan tahap pertama Segara Anakan tahun 1986 dan AMDAL Jatigede tahun 1986 menegaskan lagi bahwa baik aliran pestisida maupun pupuk belum mengakibatkan perusakan kualitas air sungai yang berarti (World Bank, 1990). Namun, kebijakan pemerintah melalui INSUS, SUPRA-INSUS yang mewajibkan petani menggunakan pupuk an organik dan pestisida kimia, bukan tidak mungkin banyak aliran sungai di Indonesia telah tercemari dari kegiatan pertanian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeliharaan Lingkungan adalah Kebijakan Ekonomis

Sejak awal pembangunan, Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam secara intensif. Namun agenda pelestarian sumber daya alam, termasuk pelestarian lingkungan, belum menjadi titik perhatian yang serius dalam masalah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada Orde Baru maupun saat ini secara konsisten menunjukkan angka yang tinggi, sekitar 6-7 % per tahun. Namun, sesungguhnya prestasi tersebut belum memperhitungkan (1). Kerusakan sumber daya alam atau biaya lingkungan; (2). Unsur deplesi atau degradasi terhadap modal alam seperti air, tanah, udara, mineral serta daerah perawan (*wilderness area*) dan (3) output yang berbahaya yaitu polusi banjir dan sebagainya (Faisal Basri, 2002; Akhmad Fauzi, 2004, BPS, 2012).

Produk sampingan dari perkembangan industri mengakibatkan pencemaran dan kerusakan alam, lebih dari itu eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi ambang batas akan mengakibatkan pembangunan itu sendiri tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Stok sumber daya alam akan habis sehingga pembangunan akan terhenti.

Permasalahan pemanfaatan sumber daya alam selalu tidak lepas dari keadilan/pemerataan antar generasi (generasi dulu, sekarang dan yang akan datang) dan intra generasi (antar kelompok masyarakat). Oleh karena itu penting sekali agar sumber

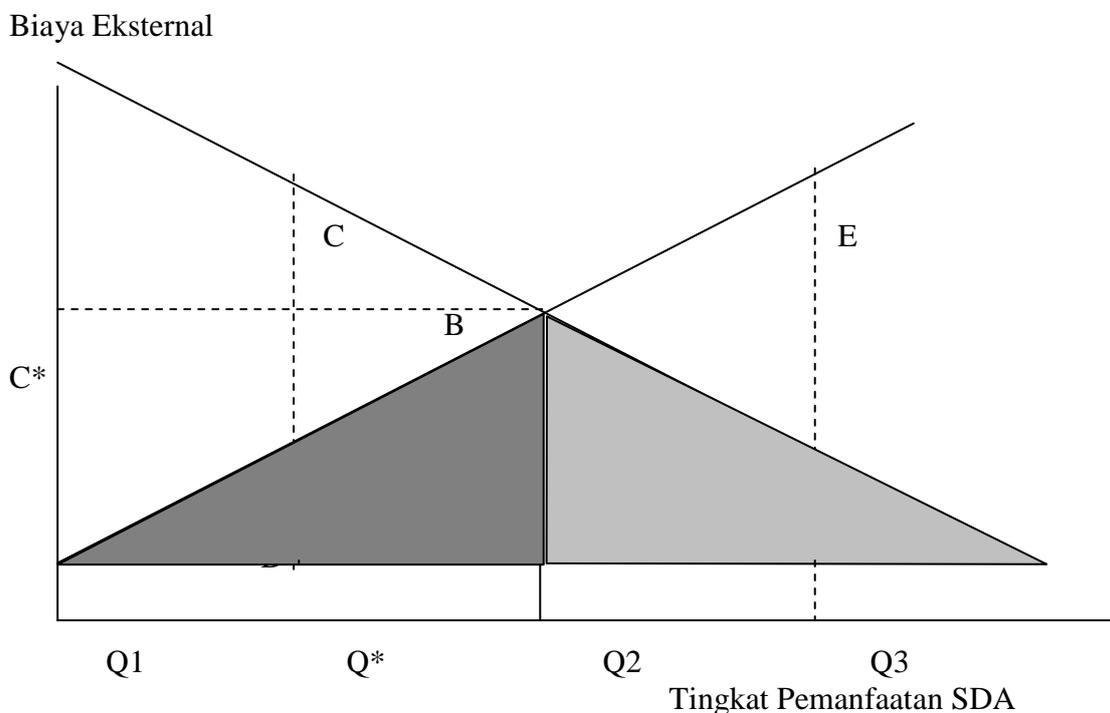
daya alam dikelola secara berkesinambungan dalam proses jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) hendaknya tetap menjaga agar *capital stock* tersebut terjaga dan selalu berada dalam titik optimum. Sedangkan, strategi pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) hendaknya melalui pemakaian dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan berusaha mencari substitusinya.

Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang sustainable, dan visi mikronya adalah menciptakan/mempertahankan keanekaragaman hayati dan non hayati dan juga harus memiliki rasa keadilan dalam jangka panjang. Untuk mencapainya tidak dapat sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar, karena memiliki beberapa kelemahan. Yaitu, adanya kegagalan pasar karena eksternalitas dan barang publik, hal ini menyebabkan harga sumber daya alam lebih murah (*under pricing*) karena tidak memasukkan unsur *deplesi*, begitu juga barang industri harganya lebih murah karena tidak memasukkan unsur eksternalitas negatif, polusi misalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut. Instrumen pemerintah untuk mengatasi adalah antara lain pengenaan pajak dan pengaturan melalui perundangan yang memberikan hak, kewajiban dan sanksi-

sanksi. Mekanisme pasar yang berlebihan sering mengakibatkan hilangnya rasa keadilan baik intra generasi, antar generasi dan pembangunan berkelanjutan itu sendiri (Suparmoko dan Suparmoko, 2000; Faisal Basri, 2002 dan Akhmad Fauzi, 2004).

Tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang optimal pada Q^* (Gambar 2), menunjukkan kondisi dimana terdapat kerugian yang minimal, misalnya pengambilan kayu hutan untuk waktu tertentu atau polusi dalam jumlah kecil, namun secara ekonomi masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dari proses pertambahan nilai dari sumber daya alam yang dieksploitasi. Khususnya pada sumber daya alam yang terbarukan,

pemanfaatan yang terkendali memberikan ruang dan waktu bagi regenerasi sumber daya tersebut. Namun apabila sumber daya alam tersebut dimanfaatkan secara besar-besaran pada Q_2 , atau bahkan Q_3 dengan external cost yang tidak memadai (Q^*Q_2GB), maka masyarakat akan menderita kerugian sebesar Q^*Q_2EB yang jauh melebihi external cost. Teori di atas sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang pada dasarnya menugaskan DPR dan Pemerintah untuk menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan lestari (Bappenas, 2004).



Gambar 2. Tingkat Optimal Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Gliss et al. 1996 : 168 dalam Bappenas, 2004)

Perkembangan Perhatian terhadap Lingkungan di Indonesia

Kalau diteliti lebih jauh, Indonesia telah mempunyai komitmen yang sangat lama tentang konsep perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Namun perhatian itu mulai sangat menonjol pada awal tahun 1970-an. Komitmen itu bahkan kemudian dikemukakan pada Konferensi Lingkungan Hidup (*Conference on the Living Environment*) yang diadakan di Stockholm tahun 1972 (Addinul Yakin, 2004). Sebagai tindak lanjut, dalam GBHN tahun 1973, pemerintah telah menuangkan kehendak pemerintah untuk memperhatikan masalah lingkungan dalam pembangunan nasional. GBHN menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang komprehensif yang mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang. Pemerintah membentuk Komite Penyusunan Kebijaksanaan Lingkungan di bawah koordinasi dari wakil ketua Bappenas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Komitmen semakin nyata dengan diadakannya Menteri Negara untuk Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tahun 1978 (Pelita III), kemudian dikenal sebagai Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 1983 (Pelita IV), pada kabinet 1993 (Pelita V) berubah menjadi Menteri Lingkungan Hidup sampai dengan sekarang

(<http://www.menlh.go.id/sejarah/>). Perhatian pemerintah itu menunjukkan bahwa adanya kesadaran pihak birokrasi tidak hanya terhadap bencana alam dan biaya sosial yang meningkat dan efek samping dari pembangunan ekonomi, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan. Pentingnya perhatian masalah lingkungan dalam kebijaksanaan pembangunan di Indonesia telah diperkuat lagi pada kesempatan merayakan Hari Lingkungan Hidup Dunia 1987 dan dalam sambutan para perencana ekonomi terkemuka. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik khusus pada pertemuan konsorsium pemberi dana (IGGI) tahun 1988. Selanjutnya pengelolaan lingkungan telah menjadi satu tema pokok dalam Repelita V (1989-1994) sampai dengan Repelita VI (1995 – 2000).

Pada dekade 70-an dan 80-an, kegiatan ditekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu dan masalah lingkungan, dan meletakkan landasan dan unsur-unsur penting dan strategi bagi pembangunan dan pertumbuhan yang sustainable, termasuk di dalamnya hukum-hukum dan peraturan, system informasi, skill dan keahlian di bidang lingkungan dan jaringan pendukung bagi organisasi lingkungan. Telah banya hasil yang dicapai dalam perkembanganya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan tahun 1982, sebagai pionir dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia dan sekaligus sebagai batu loncatan bagi perkembangan hukum lingkungan serta menjadi landasan bagi pelaksanaan keputusan dan regulasi yang lebih mendetail. Hukum Pengelolaan Lingkungan nomor 4 tahun 1982 itu diantaranya memberikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 yang memberikan petunjuk pelaksanaan proses AMDAL di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan satu kerangka organisasi dan proses untuk membuat departemen pemerintah pusat untuk menangani pekerjaan pada analisa lingkungan. Tahun 1989 diperkenalkan Program Kali Bersih (PROKASIH), sebagai usaha bersama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi polusi industri yang mencemari sungai-sungai, dimulai dari Pemda DKI, tahun 1994 berkembang menjadi Proper Prokasih (Suparmoko dan Suparmoko, 2000). Pada tahun yang sama diperkenalkan program Adipura yang menilai kota dari segi lingkungan (kebersihan) dan faktor-faktor terkait. Tahun 1990 dibentuk BAPEDAL melalui Kepres No 23 5 Juni 1990, sebagai lembaga pemerintah non departemen diketuai Menteri KLH dan

bertanggung jawab langsung pada presiden. Perkembangan lebih lanjut adalah berkembangnya Pusat Studi Lingkungan (PSL) di perguruan negeri di 27 propinsi, pertama didirikan di UNPAD 1972, sekarang jumlahnya sudah 57 buah. Gerakan Lingkungan di Indonesia lebih diperkuat lagi dengan munculnya berbagai LSM di bidang lingkungan hidup seperti WALHI pada tahun 1980. Namun demikian keluarnya Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup baru muncul tahun 1982 diikuti peraturan pemerintah no 29 tahun 1986 lebih lambat dibandingkan dengan yang ada di Negara ASEAN lainnya.

Selama pelaksanaan UNCED di Rio, Brasil Juni 1992, Indonesia ikut menandatangani persetujuan-persetujuan yang dihasilkan antara lain tentang Perubahan Iklim, disahkan oleh MPR tahun 1994 dan disampaikan ke PBB pada tahun yang sama. Tahun 1996 Menteri LH mengeluarkan keputusan No 16/MENLH/4/1996 yang mengatur tentang Program Langit Biru. Program ini mewajibkan kalangan industri untuk memasang alat penurun kadar polutan gas buangan pabrik.

KTT Bumi di Rio tahun 1992 memunculkan program aksi untuk pembangunan berkelanjutan yang sering disebut dengan Agenda 21, yang mana 10 tahun kemudian dilanjutkan dengan KTT pembangunan berkelanjutan.

Makin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan makin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Tahun 1997 diterbitkan Undang-undang no 23 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang mana dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-undang No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Hingga sekarang telah banyak diterbitkan regulasi sebagai dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya yang terbaru, Inpres no 14 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan penebangan kayu ilegal di kawasan hutan dan perdarannya di Seluruh Indonesia. Illegal logging telah merugikan Negara 35 triliun per tahun. Pada tahun 2012 telah dirancang draft Inpres Moratorium Konversi Lahan Pertanian (Tempo, 14 Desember 2012).

Kebijakan Pembangunan pada Era Reformasi

Pada era reformasi, MPR menetapkan TAP/IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2000 yang memuat arah kebijakan penyelenggaraan Negara untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Negara. Sesuai dengan amanat GBHN, arah kebijakan dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden dan DPR yaitu sebagai UU No. 25 tahun 2000. Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional serta merupakan konsensus dan komitmen bersama rakyat Indonesia mengenai pencapaian visi (tujuan pembangunan nasional) dan misi bangsa (sasaran pembangunan nasional).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, permasalahan yang dihadapi pada pembangunan di Indonesia antara lain adalah (1) merebaknya konflik sosial dan munculnya gejala disintegrasi bangsa, (2) lemahnya penegakan hukum dan hak azasi manusia, (3) lambatnya pemulihan ekonomi, (4) rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional dan (5) kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat; disusunlah prioritas pembangunan yaitu (1) membangun system politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan an kesatuan, (2) mewujudkan supremasi hukum dan

pemerintahan yang baik, **(3) mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan**, (4) membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya serta (5) meningkatkan pembangunan daerah.

Pada prioritas pembangunan yang ketiga yang dinyatakan sebagai pembangunan ekonomi salah satu programnya adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Apabila ditinjau dari latar belakang penyusunan prioritas pembangunan, kerusakan lingkungan belum menjadi pusat perhatian yang nyata, namun pada prioritas pembangunan, pembangunan lingkungan sebagai pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara berkelanjutan telah ditetapkan sebagai landasan pembangunan ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, seperti halnya GBHN 1999-2004 mengamanatkan :

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik
4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang
5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

Sesuai dengan prioritas di atas, program-program yang dicanangkan untuk dilaksanakan selama lima tahunan antara lain :

1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam
3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup
4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
5. Program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Setiap program mempunyai tujuan, sasaran dan kegiatan pokok dan indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan dari setiap program yang telah ditetapkan. Selain itu telah ditetapkan pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai agenda pembangunan nasional tahun 2004 -2009. Pada agenda tersebut dinyatakan bahwa proses pembangunan selain telah menghasilkan kemajuan juga menyisakan banyak permasalahan antara lain (1) masih lemahnya karakter bangsa, **(2) belum terbangunnya sistem**

pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan, (3) belum berkembangnya nasionalisme kemanusiaan serta demokrasi politik dan ekonomi, (4) belum terejawantahnya nilai-nilai utama kebangsaan dan belum berkembangnya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengadopsi dan memaknai nilai-nilai kontemporer secara bijaksana dan (5) kegamangan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan, pemerintahan dan kenegaraan dalam menghadapi perubahan.

Permasalahan mendasar tersebut perlu ditangani secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang berkembang dewasa ini pula merupakan langkah awal pemecahan mendasar tersebut. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia, ditetapkan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yaitu :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman,bersatu, rukun dan damai
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak azasi manusia, serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan

Penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembedaan

gunakan berkelanjutan.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan lingkungan diharapkan tetap menjadi pondasi atau landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Otto Sumarwoto (<http://www.kompas.com>), terdapat dualisme antara propenas dengan Agenda 21. Secara umum pembangunan berkelanjutan bertumpu pada ekonomi, lingkungan hidup dan sosial budaya, karena itu pertumbuhan ekonomi saja tidak memenuhi syarat pembangunan berkelanjutan. Syarat lain adalah pembangunan harus berwawasan lingkungan. Propenas menjadi tugas Menteri/Bappenas, sedangkan Agenda 21 menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup.

Masalahnya adalah pembangunan berkelanjutan lebih mahal dari pada pembangunan nasional, sehingga terdapat antagonistik dan pembangunan berkelanjutan terpinggirkan. Berdasarkan penelitian konsultan UNDP, pusat dan daerah tidak ada komitmen untuk melaksanakan agenda 21. Hal ini menunjukkan propenas dan agenda 21 tidak bertemu, agenda 21 tidak menjiwai propenas, sehingga pembangunan tidak berwawasan lingkungan. Jika hal tersebut berlanjut, maka pembangunan tidak akan berkelanjutan. Tanda-tandanya jelas yaitu

kerusakan hutan, banjir, kekeringan, pencemaran semakin meningkat.

Propenas harus dalam teori dan praktek berwawasan lingkungan. Agenda 21 sebagai pedoman saja tidak cukup, tidak ada kekuatan hukum, dan harus dilebur. Pembangunan harus menjadi satu kerjasama antara Bappenas dengan Menteri Lingkungan Hidup. Untuk peleburan itu prasangka bahwa pembangunan berwawasan lingkungan yang menjadi syarat tercapainya pembangunan berkelanjutan adalah mahal harus dihapus. Konsep eko-efisiensi yang menggabungkan efisiensi ekonomi dan efisiensi ekologi menjadikan *cost center* menjadi *profit center*. Dengan demikian ekonomi berwawasan lingkungan mempertinggi profit dan daya saing di pasar global. Tolok ukur pembangunan kearah pembangunan berkelanjutan terdapat **empat pilar**, yaitu : pro lingkungan hidup, pro miskin (pro si miskin), pro perempuan dan pro lapangan pekerjaan. Dengan empat pilar tersebut akan menyelaraskan pondasi demokrasi pembangunan dengan tujuan gerakan reformasi. Dengan empat pilar yang merupakan tolok ukur kuantitatif pembangunan berkelanjutan, pembangunan pada setiap daerah dapat dipantau dan dievaluasi apakah bersifat pembangunan berkelanjutan. Dengan pantauan dan evaluasi tersebut tiap kepala daerah dipacu untuk melakukan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Pearce and Atkinson dalam Soerjani (2002), pembangunan Indonesia dinilai belum *sustainable*. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa depresiasi (pengurangan) sumber daya alam Indonesia besarnya adalah 17% dari GDP, sedangkan hasil yang ditabung atau investasi hanya mencapai 15%. Pembangunan itu baru dinilai *sustainable* dalam memanfaatkan sumber daya alam, apabila dapat diupayakan nilai tambah sumber daya alam itu melalui rekayasa teknologi dan seni, sehingga kalau yang dikonsumsi nilai tambahnya, sangat mungkin nilai pokoknya dapat ditabung untuk investasi yaitu senilai minimal 17% atau bahkan lebih. Kondisi kini tidak jauh berbeda.

Faktor Penentu Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Masalah lingkungan adalah masalah yang sangat kompleks yang sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah dengan seluruh perangkat terkait, pihak swasta dan atau pelaku ekonomi, serta masyarakat luas atau konsumen. Kesemua unsur ini perlu keterpaduan dan kebersamaan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kajian lingkungan itu sendiri perlu pula melibatkan berbagai ahli (multidisipliner) baik dari sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan politik.

1. **Kehendak politik pemerintah**
Kehendak politik pemerintah yang berkaitan dengan penanganan masalah lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah faktor penting dalam mempercepat proses tersebut. Benturan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan kadang sulit bagi pemerintah untuk menerapkan konsep yang berwawasan lingkungan. Kehendak politik tidak hanya dengan pernyataan dan simbol politik saja melainkan direalisasikan dalam kebijaksanaan dan ketertiban pelaksanaannya. Institusi-institusi yang menangani serius masalah lingkungan itu harus diwujudkan, serta aturan-aturan dan tindakan-tindakan hukum bagi perusak lingkungan harus disusun dan dikeluarkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masalah politik pemerintah ini dianggap sebagai faktor utama apakah konsep pembangunan berkelanjutan itu hanya merupakan cita-cita ideal atau terwujud dalam kenyataan.
2. **Peranan institusi lingkungan pemerintah**
Salah satu tindak lanjut dari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, pemerintah telah mendirikan dan mengembangkan insitusi yang menangani isu lingkungan yaitu BAPEDAL dan PSL serta lembaga-lembaga terkait. Lembaga-lembaga

tersebut dapat dikatakan sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan di Indonesia. Efektifitas dan efisiensi kerja dari lembaga tersebut menjadi kunci utama tercapainya tujuan kebijaksanaan lingkungan di Indonesia. Kelemahan lembaga-lembaga tersebut umumnya adalah tidak ada unit pelatihan lingkungan yang bersifat umum dan struktur organisasi tidak mencakup seksi hukum untuk menyiapkan peraturan dan standar serta untuk monitoring terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Selain itu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas yaitu pendanaan, birokrasi, kedekatan dengan pemerintah (BAPEDAL sering tidak independen), ketersediaan staf dan wewenang.

3. Peranan lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Kehadiran LSM yang bergerak di bidang lingkungan mempunyai arti tersendiri dalam gerakan pembangunan yang berkelanjutan. Lembaga ini dapat secara langsung menangani proyek-proyek untuk mengatasi masalah lingkungan, serta mendidik masyarakat akan sadar lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas lembaga tersebut dapat mengubah opini masyarakat untuk ikut peduli lingkungan sehingga mendorong masyarakat maupun pemerintah untuk lebih memperhatikan lingkungan.

Pemerintah harus mendukung perkembangan lembaga tersebut. Namun dalam konstelasi politik, tidak jarang kehadiran lembaga tersebut menimbulkan masalah karena perbedaan konsep dan kepentingan.

4. Peranan sektor industri

Walaupun strategi kebijakan lingkungan lebih diarahkan untuk sector produsen dan kadang tidak menguntungkan secara ekonomi, dukungan pelaku ekonomi produsen adalah salah satu kunci utama dalam kesuksesan pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan timbul banyak karena aktifitas ekonomi yang selama ini belum memperhitungkan biaya lingkungan atau sosial sebagai dampak dari aktifitasnya. Limbah industri dan pertanian misalnya memberikan kontribusi penting terhadap masalah lingkungan. Karena orientasi sektor ini dititikberatkan pada ekonomi, sedangkan pencegahan masalah lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka agak sulit untuk tumbuhnya kesadaran pihak industri untuk melaksanakan upaya pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Ini misalnya terlihat dengan adanya keengganan sebagian produsen di Indonesia dalam menerapkan kebijakan program LANGIT BIRU, dari sebelas industri yang layak untuk menjalankan program

ini, hanya tiga yang sudah menandatangani surat pernyataan yaitu PT. Indocement, PLTU Suralaya dan PT. Krakatau Steel. Alasannya adalah harga alat sangat mahal yaitu Rp. 140 milyar – Rp. 150 milyar (Addinul Yakin, 2004 : 249).

Perlu pendekatan ekonomi dan hukum baik oleh pemerintah, produsen maupun masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan berkelanjutan.

5. Peranan media massa

Peranan media massa sangat penting dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi tetapi sekaligus bisa mengubah opini masyarakat tentang masalah yang diberitakan. Hal yang sama bisa terjadi dalam sosialisasi dan penyampaian informasi tentang lingkungan. Sadar lingkungan (DARLING) merupakan kunci penting tentang partisipasi aktif masyarakat dalam menangani masalah lingkungan. Pemberitaan yang sering tentang masalah lingkungan serta masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaannya, pelanggaran serta proses pelaksanaan AMDAL misalnya akan efektif bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan.

6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat

Kesadaran masyarakat akan lingkungan merupakan factor penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat terhadap masalah lingkungan sangat tergantung pada tingkat kesadaran dan kepedulian mereka. Kesadaran tumbuh bila masyarakat sudah merasakan pentingnya lingkungan sebagai asset dan konsumsi yang berharga. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengendalian masalah lingkungan perlu upaya terarah dan berkesinambungan, disamping peningkatan faktor-faktor di atas. Usaha peningkatan dapat diupayakan dengan berbagai macam cara terutama untuk meningkatkan pengetahuannya tentang lingkungan serta dampak kerusakannya terhadap kehidupan manusia.

Selain faktor penentu tersebut diatas, hambatan-hambatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Agenda 21 adalah (MoE, 2002) :

1. Hambatan Nasional

- a. Lemahnya kepedulian dan platform bersifat umum (common platform)
- b. Pendekatan pengembang bersifat sentralistik dan tidak terpadu
- c. Kurangnya kehendak pemerintah, kemampuan institusi masih lemah dan kekuatan hukum masih rendah

d. Kurangnya keterlibatan kelompok masyarakat

e. Kurangnya dana, teknologi dan sumber daya manusia yang berkemampuan

2. Hambatan Internasional

Realisasi komitmen masyarakat internasional terhadap Indonesia berkurang dengan berkurangnya GDP, dengan demikian penyediaan dananyapun berkurang. Indonesia juga masih lemah dalam mengakses teknologi apalagi teknologi informasi yang sangat berguna bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan ini. Dengan adanya liberalisasi ekonomi, banyak regulasi perdagangan internasional tidak serasi bagi ekologi dan keberlanjutan sosial.

Faktor penentu dan hambatan-hambatan tersebut di atas dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah, penyelenggara pemerintahan, kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya baik di pusat maupun daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang pesat baik sektor industri maupun pertanian dan jasa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat ini, mulai muncul kesadaran akan bahaya lingkungan sebagai efek samping dari pembangunan tersebut. Masalah polusi

udara dan air di perkotaan, polusi dan degradasi lahan serta eksekusi deforestasi akibat eksploitasi hutan baik yang legal maupun yang illegal merupakan sebagian masalah lingkungan yang menonjol untuk segera ditangani.

Dibandingkan dengan negara lain, perhatian Indonesia terhadap masalah lingkungan masih belum banyak. Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Pada era reformasi, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan diharapkan menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi. Propenas (2000-2004) sebagai pelita di era reformasi dianggap antagonistik dengan Agenda 21, sehingga pembangunan nasional dinilai belum merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Perlu penambahan nilai pada setiap pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dukungan berbagai unsur masyarakat agar upaya pembangunan berwawasan lingkungan bisa diwujudkan.

Peranan dan kehendak politik pemerintah merupakan kunci utama keberhasilannya, selain dukungan dan peran serta lembaga lain seperti pelaku ekonomi, LSM, media massa, yang secara bersama-sama dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Masalah-masalah yang menghambat perkembangan keterlibatan faktor-faktor tersebut harus dikaji dengan seksama dan komprehensif, dan dicarikan

jalan keluarnya yang sesuai dengan ketersediaan sumberdaya serta kualitas pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addinul Yakin. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 2004.
- Agenda 21. *Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. Membuat Pembangunan Berlanjut, Upaya Mencapai Kehidupan yang Makin Berkualitas*. Kantor Negara Lingkungan Hidup. Jakarta. 2000.
- Akhmad Fauzi. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Gramedia. Jakarta. 2004
- Bappenas, *Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Antara Krisis dan Peluang*. Bappenas, Jakarta. 2004.
- Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. Bappenas. Jakarta. 2005.
- BPS. *Data Strategis BPS*. BPS. Jakarta. 2012
- Bungaran Saragih. *Agribisnis*. IPB Press. Bogor. 2011
- Faisal Basri. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta. 2002.
- Gills et all dalam Bappenas, *Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Antara Krisis dan Peluang*. Bappenas, Jakarta. 2004.
- Joyo Winoto. *Teori Pembangunan*. Pascasarjana IPB. Bogor. 2000
- Ministry of Environment, *From Crisis to Sustainability. Paving the Way for Sustainable Development in Indonesia. Overview of the Implementation of Agenda 21*. MoE RI. 2002.
- Nana Apriyana. *Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Memperthankan Ketahanan Pangan Nasional*. Bappenas. Jakarta. 2011
- Pearce and Atkinson dalam Soerjani, M. *Ekologi Manusia*. Universitas Terbuka, Jakarta. 2002
- Soerjani, M. *Ekologi Manusia*. Universitas Terbuka, Jakarta. 2002.
- Suparmoko M., dan M.R. Suparmoko. *Ekonomi Lingkungan*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta. 2000.
- Tempo. *Moratorium Konversi Lahan Pertanian*. Jakarta. 12 Desember 2012.
- Today, M.P. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Buku 1. Terjemahan Agustinus Subekti. Bumi Aksara. Jakarta. 1995.
- Tulus TH. *Tambunan. Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang RI No. 32 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang RI No. 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*.
<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0306/05/opini>
<http://www.menlh.go.id/sejarah/>